PERKEMBANGAN POLITIK DAN KEKUASAAN PADA AWAL ORDE BARU HINGGA PEMILU 1971

Dara Umaira[1], Hawa Nur Alifa[2], Nafahatila Wafa[3], Sherly Suci Azzahra[4], Etmi Hardi[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : [1]daraumaira174@gmail.com, [2]hawanuralifa08@gmail.com, [3]nafahatila9@gmail.com, [4]suciazzahrasherly52@gmail.com, [5]etmihardi@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika politik Indonesia pada masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru dengan fokus pada Supersemar, dualisme kepemimpinan nasional, dan konsolidasi politik menjelang Pemilu 1971. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Supersemar menjadi titik awal peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto secara bertahap. Pada masa transisi terjadi dualisme kepemimpinan, di mana Soekarno masih menjabat secara formal, tetapi pengaruh Soeharto semakin dominan melalui dukungan militer, birokrasi, dan kelompok politik. Konsolidasi politik kemudian dilakukan melalui penguatan Golkar sebagai kendaraan politik utama pemerintah, yang berujung pada kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 sebagai bentuk legitimasi kekuasaan Orde Baru.

Kata Kunci : *Supersemar, Orde Baru, Soeharto, Golkar, Pemilu 1971*

ABSTRACT

This study examines the political dynamics of Indonesia during the transition from the Old Order to the New Order, focusing on Supersemar, leadership dualism, and political consolidation leading to the 1971 General Election. The research uses a historical method with a descriptive-analytical approach through library research.The results show that Supersemar marked the beginning of the gradual power shift from Soekarno to Soeharto. During this transition, leadership dualism occurred as Soekarno remained president formally, while Soeharto's influence increased through military, bureaucracy, and political support. Political consolidation was carried out through strengthening Golkar as the main political vehicle, leading to its victory in the 1971 election as a form of regime legitimacy.

Keywords : *Supersemar, New Order, Soeharto, Golkar, 1971 Election*

PENDAHULUAN

Peralihan kekuasaan dari masa Orde Lama menuju Orde Baru menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Pergantian kekuasaan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses politik yang cukup panjang setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Peristiwa tersebut menimbulkan krisis nasional yang berdampak besar terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Situasi pemerintahan pada masa itu mengalami ketidakstabilan akibat munculnya konflik politik, demonstrasi masyarakat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Di tengah kondisi tersebut, militer terutama Angkatan Darat mulai memperoleh pengaruh yang semakin besar dalam kehidupan politik nasional di bawah kepemimpinan Letnan Jenderal Soeharto. Peran militer yang semakin dominan kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam proses lahirnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia (Hasan, 2025)

Awal pemerintahan Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966. Supersemar menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memulihkan keamanan negara sekaligus memperkuat posisi politiknya. Setelah keluarnya Supersemar, terjadi masa transisi kekuasaan yang ditandai dengan dualisme kepemimpinan nasional antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto. (Hasan, 2025)

Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mulai melakukan berbagai upaya konsolidasi politik untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan negara. Konsolidasi tersebut dilakukan melalui penguatan peran militer dalam kehidupan politik, pemanfaatan birokrasi sebagai alat pendukung pemerintah, serta pembentukan Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik utama Orde Baru. Dalam praktiknya, Golkar memperoleh dukungan besar dari aparat negara, pegawai negeri, dan institusi militer sehingga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan partai politik lainnya. Upaya konsolidasi kekuasaan tersebut mencapai puncaknya pada pelaksanaan Pemilu 1971 yang menjadi pemilu pertama pada masa Orde Baru. Dalam pemilu tersebut, Golkar berhasil memperoleh kemenangan mayoritas dengan dukungan penuh pemerintah. Kemenangan Golkar kemudian dijadikan sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintahan Soeharto untuk memperkuat dominasi Orde Baru dalam sistem politik Indonesia. (Fahira,2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji perkembangan politik Indonesia pada awal Orde Baru hingga Pemilu 1971. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan serta menganalisis berbagai peristiwa politik yang terjadi pada masa transisi kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru.Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku sejarah, artikel akademik, dan dokumen yang berkaitan dengan Supersemar, peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto, serta Pemilu 1971. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendukung pembahasan penelitian.

Tahapan penelitian meliputi heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, verifikasi digunakan untuk menguji keabsahan sumber, interpretasi dilakukan untuk memahami fakta sejarah,

sedangkan historiografi merupakan tahap penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Supersemar: Latar Belakang dan Implementasinya

Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia karena menjadi awal peralihan kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Supersemar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 di tengah kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Situasi tersebut memunculkan berbagai konflik politik, demonstrasi mahasiswa, serta meningkatnya pengaruh militer dalam pemerintahan. Melalui Supersemar, Presiden Soekarno memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan menjaga stabilitas negara. Keberadaan Supersemar kemudian menjadi titik awal menguatnya posisi politik Soeharto sekaligus membuka jalan bagi lahirnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. (Naufal, D. A.,2024)

Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik Indonesia yang sedang mengalami ketidakstabilan pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Pada masa tersebut, keadaan ekonomi nasional mengalami kemerosotan yang ditandai dengan tingginya inflasi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selain itu, muncul berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam gerakan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Melalui gerakan tersebut, mahasiswa menuntut pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora yang dianggap terpengaruh unsur komunis, serta perbaikan kondisi ekonomi nasional. Situasi politik dan keamanan yang semakin tidak kondusif menyebabkan posisi Presiden Soekarno semakin melemah dan membuka peluang semakin besarnya pengaruh militer dalam pemerintahan Indonesia.(Mustamin, 2023)

Dalam situasi politik yang semakin tidak stabil, Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Letnan Jenderal Soeharto memperoleh dukungan politik yang semakin kuat dari masyarakat, mahasiswa, dan elite pemerintahan. Dukungan tersebut muncul karena Soeharto dianggap mampu mengendalikan keamanan nasional setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI. Setelah menerima Supersemar, Soeharto segera mengambil langkah politik dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam gerakan tersebut. Kebijakan tersebut menunjukkan semakin besarnya pengaruh militer dalam pemerintahan sekaligus memperkuat posisi Soeharto dalam proses peralihan kekuasaan di Indonesia. (Rohman, F. S., 2025)

Implementasi Supersemar tidak hanya berkaitan dengan upaya pemulihan keamanan nasional, tetapi juga berkembang menjadi instrumen politik dalam proses perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Melalui kewenangan yang diperoleh dari Supersemar, Soeharto mulai melakukan konsolidasi politik dan memperkuat pengaruh militer dalam pemerintahan. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya pemerintahan Orde Baru yang berorientasi pada stabilitas politik, pembangunan nasional, dan pengendalian kehidupan politik masyarakat secara lebih terpusat. Mustamin. (2024

Masa Transisi dan Dualisme Kepemimpinan Nasional

Setelah keluarnya Supersemar, Indonesia memasuki masa transisi politik yang ditandai oleh munculnya dualisme kepemimpinan nasional antara Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto. Secara konstitusional, Soekarno masih tetap menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia,

namun dalam praktik politik dan militer, pengaruh Soeharto semakin menguat seiring dukungan dari Angkatan Darat serta berbagai kelompok politik yang menolak komunisme. Kondisi ini membuat posisi Soekarno semakin melemah dalam pengambilan keputusan politik nasional. Situasi tersebut kemudian mendorong terjadinya pergeseran arah kekuasaan secara bertahap dari Orde Lama menuju Orde Baru yang lebih berorientasi pada stabilitas politik dan penguatan peran militer dalam pemerintahan. (Apandi, 2025).

Soeharto kemudian memanfaatkan dukungan dari unsur militer, birokrasi, serta gerakan mahasiswa untuk memperkuat kedudukannya dalam struktur pemerintahan nasional. Dalam Sidang Umum MPRS tahun 1966, dihasilkan berbagai keputusan politik yang secara bertahap membatasi kewenangan Presiden Soekarno. Selain itu, pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dikenal dengan Nawaksara ditolak oleh MPRS karena dianggap tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai kondisi nasional pasca peristiwa G30S/PKI. Penolakan tersebut semakin memperlemah posisi politik Soekarno, baik di lingkungan lembaga negara maupun di tengah masyarakat, sehingga mempercepat proses pergeseran kekuasaan menuju Soeharto. (Ramadhan ,2026).

Konsolidasi Politik dan Pemilu 1971

Pemerintahan Orde Baru pada awalnya menitikberatkan pada upaya menjaga stabilitas politik serta mendorong pembangunan ekonomi nasional sebagai prioritas utama. Untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya, pemerintah melakukan konsolidasi politik melalui penguatan peran birokrasi, militer, serta pembentukan dan penguatan Golongan Karya (Golkar). Dalam proses tersebut, Golkar kemudian dijadikan sebagai kendaraan politik utama pemerintah dalam menghadapi Pemilu 1971 yang berfungsi untuk memperkokoh dominasi politik Orde Baru di Indonesia.(Simorangkir, 2021).

Pemilu 1971 merupakan pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah yang sangat ketat. Pemerintah berupaya memperoleh legitimasi politik dengan mendorong kemenangan Golongan Karya (Golkar) sebagai kekuatan politik utama, yang kemudian bersaing dengan partai-partai politik lainnya di Indonesia. Dalam prosesnya, Golkar memperoleh dukungan melalui berbagai strategi politik yang sistematis dan terstruktur. Media massa pada masa itu juga cenderung mendukung kebijakan pemerintah, sehingga memperkuat posisi Golkar dalam kontestasi politik nasional. Pemilu ini tidak hanya menjadi sarana demokrasi formal, tetapi juga menjadi instrumen penting bagi pemerintah Orde Baru dalam mengonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat legitimasi politik di bawah kepemimpinan Soeharto. (Suwirta, 2019)

Hasil Pemilu 1971 menunjukkan kemenangan besar bagi Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan suara mayoritas dan dominasi kursi di parlemen. Kemenangan tersebut memperkuat posisi serta legitimasi politik pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Selain itu, kondisi ini juga menandai semakin menguatnya sistem politik yang bersifat sentralistis dan cenderung otoriter. Dalam praktiknya, Pemilu pada masa Orde Baru lebih banyak berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan pemerintah dibandingkan sebagai sarana demokrasi yang benar-benar bebas dan kompetitif.(Rumyati,2023& Pratiwi, 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peralihan kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru merupakan proses politik yang berlangsung secara bertahap setelah peristiwa

G30S/PKI tahun 1965. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) menjadi titik awal penting yang memperkuat posisi Soeharto dalam struktur kekuasaan nasional dan membuka jalan bagi terjadinya perubahan politik di Indonesia.

Pada masa transisi, terjadi dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto. Meskipun secara konstitusional Soekarno masih menjabat sebagai presiden, pengaruh Soeharto semakin menguat melalui dukungan militer, birokrasi, dan kelompok politik anti-komunis. Hal ini menyebabkan melemahnya posisi politik Soekarno dan mempercepat proses peralihan kekuasaan.

Selanjutnya, konsolidasi politik Orde Baru dilakukan melalui penguatan Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik utama pemerintah. Strategi ini berhasil memperkuat dominasi politik Soeharto yang kemudian dibuktikan melalui kemenangan besar Golkar dalam Pemilu 1971. Pemilu tersebut tidak hanya menjadi sarana demokrasi formal, tetapi juga menjadi alat legitimasi politik bagi pemerintahan Orde Baru dalam mengonsolidasikan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Apandi, A., Cahyani, A. R., Sari, F. R., & S, R. L. (2025). Dinamika politik dan militer di Indonesia dalam konteks pemberontakan dan peralihan kekuasaan (1946–1965). *Journal of Indonesian Social Studies Education (JISSE), 3*(1).

Fahira, N. A., Husmiati, R., & Yanuardi, M. H. (2024). Pemilihan umum 1971: Dominasi Golongan Karya dan pseudo democracy dalam Orde Baru (1966–1977). *Historiography: Journal of Indonesian History and Education, 4*(3), 259–270.

Febriansyah Ramadhan. (2026). Sejarah hukum kekosongan presiden dan wakil presiden bersamaan di Indonesia (Pelajaran dari rezim otoriter Soekarno dan Soeharto). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 33*(1), 64–91.

Hasan, N., Anam, A. S., Hermawan, M. A., & Muwahid. (2025). Era Orde Baru Indonesia: Studi negara demokrasi "rasa" otokrasi. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 4*(2), 774–786.

Mustamin. (2023). Analisis ketatanegaraan berdasarkan historis ketatanegaraan Republik Indonesia periode Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. *Jurnal Hukum dan Kenegaraan, 5*(2), 1–15.

Naufal, D. A. (2024). Supersemar dan stabilitas politik: Analisis transformasi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto berdasarkan perspektif Samuel P. Huntington. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2*(5), 15–19.

Pratiwi. A. (2020). Musik pada kampanye pemilu Orde Baru 1971–1997. *Journal of Indonesian Social Science (JIPS), 1*(2), 92–98.

Rohman, F. S. (2025). DPR-GR dalam transisi kekuasaan Soekarno ke Orde Baru tahun 1965–1971. *Keraton: Journal of History Education and Culture, 7*(1), 35–44.

Rumyati. (2023). Evolusi sistem pemilu masa Orde Baru (1966–1998). *KALA: Jurnal Pendidikan Sejarah, 11*(1), 24–35.

Simorangkir, R. R. D. (2021). Dinamika perkembangan Golkar di Kota Medan: Golkar pada Pemilu 1971. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 5*(2), 252–260.

Suwirta, A. (2019). Pers dan kritik sosial pada masa Orde Baru: Kasus Pemilu 1971 dalam pandangan Harian Kompas dan Pikiran Rakyat. *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education, 5*(1), 31–52.